

**PENDAMPINGAN PENGISIAN DATA PENDUKUNG ANALISIS BEBAN KINERJA 2024 DI
KECAMATAN DUKUH PAKIS**

Gerry Wahyu Berlia, Anggraeny Puspaningtya

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

gerrywahyuberlia@gmail.com, anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Sebagai bagian dari reformasi ini, langkah-langkah telah diambil untuk merombak struktur dan proses kerja di instansi pemerintah agar lebih adaptif dan terarah. Dalam konteks ini, pengumpulan dan analisis data menjadi krusial dalam mengevaluasi kinerja organisasi, termasuk di tingkat kecamatan. Namun, di balik urgensi analisis beban kinerja, sering kali terdapat tantangan nyata yang menghambat proses pengisian data pendukung ABK. Kendala-kendala tersebut meliputi kompleksitas proses pengumpulan data, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta perubahan kebijakan atau prosedur yang cepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tantangan ini menjadi penting untuk merancang strategi yang efektif dalam mengatasi hambatan dalam pengisian data pendukung ABK. Setiap langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada landasan hukum yang kokoh dan komprehensif. Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56 Ayat 1 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur kewajiban setiap instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan jabatan pegawai berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penerapan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang komprehensif tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi pemerintah. Pendampingan pengisian ABK bertujuan untuk memastikan bahwa data dukung yang diisikan di Kecamatan Dukuh Pakis adalah akurat, lengkap, dan relevan untuk keperluan analisis dan perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Ini dilakukan dengan memberikan bantuan dan arahan kepada petugas yang bertanggung jawab dalam mengisi data dukung ABK agar mereka dapat memahami secara mendalam pentingnya data yang diisikan serta proses pengisian yang tepat.

Kata kunci : Reformasi Birokrasi, Analisis Beban Kerja

ABSTRACT

Bureaucratic reform carried out by the government aims to improve the quality of public services in response to society's demand for more efficient, transparent, and responsive services. As part of this reform, steps have been taken to overhaul the structure and workflow processes in government agencies to be more adaptive and focused. In this context, data collection and analysis are crucial in evaluating organizational performance, including at the district level. However, behind the urgency of workload analysis, there are often real challenges that hinder the process of filling supporting data for ABK. These challenges include the complexity of data collection processes, lack of knowledge and skills, and rapid policy or procedural changes. Therefore, a deep understanding of these challenges is important in designing effective strategies to overcome obstacles in filling supporting data for ABK. Every step in the administration of government must be based on solid and comprehensive legal foundations. Article 56

Paragraph 1 of the 2014 Constitution on State Civil Apparatus regulates the obligation of every government agency to prepare the needs of employee positions based on job analysis and workload analysis. The implementation of comprehensive job analysis and workload analysis is not only a legal obligation but also a crucial step in improving the efficiency and effectiveness of government agency performance. The mentoring of ABK filling aims to ensure that the supporting data entered in Dukuh Pakis Sub-district is accurate, complete, and relevant for analysis and planning purposes in the following years. This is done by providing assistance and guidance to officers responsible for filling ABK supporting data so that they can deeply understand the importance of the data entered and the correct filling process.

Keywords: Bureaucratic Reform, Workload Analysis

PENDAHULUAN

Pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan tujuan yang jelas yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Reformasi ini menjadi suatu langkah strategis dalam menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Sebagai bagian dari upaya ini, berbagai langkah telah diambil untuk merombak struktur dan proses kerja di instansi pemerintah agar lebih adaptif dan terarah. Reformasi birokrasi ini memperkenalkan perubahan signifikan dalam pola pikir dan praktek kerja di seluruh sektor administrasi publik, dengan fokus utama pada efisiensi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Kita dapat melihat bahwa reformasi birokrasi bukan hanya sekadar sebuah perubahan kebijakan, tetapi juga merupakan sebuah komitmen untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam era digitalisasi dan peningkatan kompleksitas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, pengumpulan dan analisis data menjadi landasan yang krusial dalam mengevaluasi kinerja suatu entitas organisasi, termasuk di tingkat kecamatan. Namun, di balik urgensi analisis beban kinerja tersebut, sering kali terdapat tantangan nyata yang menghambat proses pengisian data pendukung. Kendala-kendala ini meliputi beragam aspek, mulai dari kompleksitas proses pengumpulan data yang memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai bidang seperti sumber daya manusia, infrastruktur, hingga layanan publik, hingga masalah teknis seperti keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk personel terlatih maupun infrastruktur teknologi. Terlebih lagi, pemahaman dan keterampilan yang kurang, kurangnya koordinasi antarunit organisasi, dan perubahan kebijakan atau prosedur yang cepat dapat memperumit pengisian data dengan akurat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kendala-kendala ini menjadi penting untuk merancang strategi yang efektif dalam mengatasi tantangan dalam pengisian data pendukung analisis beban kinerja, sehingga keseluruhan evaluasi kinerja organisasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi, keberadaan data yang tepat dan lengkap memiliki peranan yang tak terbantahkan. Data merupakan fondasi utama dalam memahami efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan, terutama ketika kita berbicara tentang analisis beban kinerja di tingkat kecamatan. Namun, seringkali keberadaan data yang tepat dan lengkap menjadi hal yang sulit diwujudkan. Tantangan muncul dari berbagai sumber, mulai dari kurangnya sistem pencatatan yang terintegrasi hingga masalah dalam pengumpulan data dari berbagai unit organisasi yang terpisah. Ketidaktersediaan data yang tepat dan lengkap dapat menjadi penghambat utama dalam melakukan analisis beban kinerja yang akurat dan komprehensif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang alasan di balik ketidaktersediaan data yang memadai menjadi krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pengumpulan data. Dengan memahami tantangan ini, kita dapat merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data, sehingga analisis beban kinerja yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja organisasi.

Setiap langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada landasan hukum yang kokoh dan komprehensif. Salah satu aspek yang mendasar dalam manajemen kepegawaian adalah pengaturan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai. Hal ini bukan hanya sekadar tuntutan administratif, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56 Ayat 1 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi landasan utama yang mengatur kewajiban setiap instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan jabatan pegawai. Analisis jabatan dan analisis beban kerja menjadi instrumen penting dalam proses pengelolaan kepegawaian yang efektif. Dengan melakukan analisis jabatan, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi dengan jelas jenis-jenis jabatan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas organisasi dengan optimal. Sementara itu, analisis beban kerja membantu dalam

menentukan jumlah dan distribusi tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional setiap jabatan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56 Ayat 1 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun kebutuhan jumlah maupun jenis jabatan pegawai berdasarkan pada proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan kepegawaian didasarkan pada evaluasi yang teliti terhadap kebutuhan organisasi dan pelayanan publik. Penerapan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang komprehensif bukan hanya sekedar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi pemerintah. Dengan memastikan bahwa kebutuhan jabatan pegawai disusun berdasarkan pada analisis yang cermat, diharapkan bahwa penempatan pegawai akan lebih tepat sasaran, sehingga dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Maksud dari pendampingan pengisian ABK ini adalah untuk memastikan bahwa data dukung yang diisikan di Kecamatan Dukuh Pakis adalah akurat, lengkap, dan relevan untuk keperluan analisis dan perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan arahan kepada petugas yang bertanggung jawab dalam mengisi data dukung ABK agar mereka dapat memahami secara mendalam pentingnya data yang diisikan serta proses pengisian yang tepat.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam pendampingan pembuatan data dukung ABK dilaksanakan pada tanggal 16 Februari sampai dengan 30 Juni 2024 di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Sebelum mengikuti kegiatan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di mitra dan instansi terkait, seperti Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan penempatan di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, penulis telah menempuh beberapa tahapan pendaftaran melalui akun Kampus Merdeka. Pendaftaran peserta dilakukan pada rentang waktu mulai tanggal 17 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2023. Selama proses pendaftaran ini, peserta harus menyiapkan beberapa dokumen, termasuk Surat Rekomendasi dari fakultas, Transkrip Nilai, CV, dan Proposal magang. Setelah melewati seleksi administrasi, peserta kemudian menjalani tes seleksi tahap pertama pada tanggal 1 Januari 2024. Setelah itu, peserta akan menerima email pemberitahuan tentang lolos atau penawaran magang dari mitra yang telah didaftar, yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan penempatan di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya. Setelah dinyatakan lolos dan menerima penawaran dari mitra, penulis berkoordinasi dengan kepala program studi terkait untuk mengonversi mata kuliah dan menetapkan luaran-luaran magang yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan magang.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program magang di Bagian Organisasi Daerah Kota Surabaya dengan penempatan di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dimulai pada tanggal 16 Februari 2024 dan berlangsung hingga tanggal 30 Juni 2024. Namun, periode magang ini dimulai sejak pelaksanaan pembekalan mahasiswa pada tanggal 19 hingga 26 Februari 2024. Kegiatan magang di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang fokus pada implementasi dan deskripsi tentang ABK 2024. Dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) bagi mahasiswa, terdapat jadwal yang

telah ditetapkan selama pelaksanaan magang. Pelaksanaan program MSIB dilakukan di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat XXIV No.17, Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama 5 bulan kerja, dimulai dari tanggal 16 Februari 2024

hingga 30 Juni 2024. Jadwal jam kerja selama program MSIB di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya mengikuti aturan jam kerja dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program magang di Bagian Organisasi Daerah Kota Surabaya dengan penempatan di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dimulai pada tanggal 16 Februari 2024 dan berlangsung hingga tanggal 30 Juni 2024. Namun, periode magang ini dimulai sejak pelaksanaan pembekalan mahasiswa pada tanggal 19 hingga 26 Februari 2024. Kegiatan magang di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang fokus pada implementasi dan deskripsi tentang ABK 2024. Dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) bagi mahasiswa, terdapat jadwal yang telah ditetapkan selama pelaksanaan magang. Pelaksanaan program MSIB dilakukan di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat XXIV No.17, Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama 5 bulan kerja, dimulai dari tanggal 16 Februari 2024 hingga 30 Juni 2024. Jadwal jam kerja selama program MSIB di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya mengikuti aturan jam kerja dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

3. Laporan Kegiatan

Setelah selesai periode praktik kerja, kami akan menyusun laporan lengkap yang mencakup semua aspek kegiatan. Laporan akan memuat hasil survei awal, ringkasan kegiatan praktik kerja, evaluasi atas pelaksanaan, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan akan disampaikan kepada pihak terkait di Kelurahan Kebraon untuk dipertimbangkan dalam perencanaan program selanjutnya.

HASIL dan PEMBAHASAN

Proses pendampingan pembuatan Data Dukung untuk pengisian ABK (Analisis Beban Kerja) di Kecamatan Dukuh Pakis dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- **Pemahaman Terhadap Tujuan:** Langkah pertama dalam proses pendampingan adalah memahami dengan jelas tujuan dari pembuatan Data Dukung untuk pengisian ABK di Kecamatan Dukuh Pakis. Pendamping perlu memahami secara menyeluruh mengenai kebutuhan analisis beban kerja di kecamatan tersebut, serta bagaimana data dukung tersebut akan digunakan dalam proses tersebut.
- **Identifikasi Kebutuhan Data:** Selanjutnya, pendamping perlu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan data yang spesifik untuk pengisian ABK di Kecamatan Dukuh Pakis. Ini melibatkan identifikasi jenis data yang diperlukan, format yang sesuai, dan sumber data yang dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- **Pengembangan Format dan Template:** Setelah kebutuhan data diidentifikasi, pendamping dapat membantu dalam pengembangan format dan template untuk pengisian Data Dukung. Ini mencakup pembuatan formulir atau spreadsheet yang sesuai dengan kebutuhan ABK, sehingga memudahkan petugas untuk mengumpulkan dan mengisi data dengan tepat.
- **Pendampingan Langsung:** Selain pelatihan, pendamping juga dapat memberikan pendampingan langsung saat petugas mengumpulkan dan mengisi data. Pendamping dapat memberikan arahan dan bimbingan secara langsung kepada petugas, serta membantu dalam mengatasi kendala atau kesulitan yang mungkin muncul selama proses pengisian data.

- Pemantauan dan Evaluasi: Proses pendampingan juga mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan yang dicapai dalam pengisian Data Dukung. Pendamping perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap proses pengisian data, serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan memenuhi standar yang diperlukan.

Dengan melalui langkah-langkah tersebut, proses pendampingan pembuatan Data Dukung untuk pengisian ABK di Kecamatan Dukuh Pakis dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga menghasilkan data yang akurat dan relevan untuk analisis beban kerja di kecamatan tersebut.



Gambar 1. Pendampingan Pengisian ABK dan Data Dukung



Gambar 2. Mentoring ABK di Bagian Organisasi

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran yang dapat dialokasikan untuk melakukan analisis beban kerja. Terutama dalam organisasi yang memiliki anggaran terbatas atau staf yang minim, pengisian ABK dapat menjadi tugas tambahan yang memakan waktu. Selain itu, Proses pengisian ABK seringkali melibatkan banyak langkah dan tahapan yang kompleks, terutama jika organisasi memiliki struktur kerja yang rumit atau banyak unit kerja. Hal ini dapat menyulitkan petugas dalam memahami proses pengisian dan menyebabkan kesalahan atau ketidakpastian dalam data yang dihasilkan.

Dengan adanya pendampingan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas data yang dihasilkan dalam pengisian ABK. Dengan bimbingan dan arahan yang tepat, petugas yang bertanggung jawab akan lebih mampu untuk mengumpulkan dan mengisi data dengan akurat dan relevan. Pendampingan dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam pengisian ABK. Dengan memberikan solusi atau saran yang sesuai, pendamping dapat membantu petugas untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses pengisian data.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan dalam pengisian data pendukung ABK 2024 di Kecamatan Dukuh Pakis merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan kualitas dan relevansi data yang

digunakan dalam analisis beban kerja. Melalui proses pendampingan, berbagai tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam pengisian ABK dapat diatasi, sementara pemahaman dan keterampilan petugas dalam melakukan analisis beban kerja dapat ditingkatkan. Hasilnya, diharapkan akan tercapai pengumpulan data yang lebih akurat dan relevan, yang dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat kecamatan.

Melakukan pendampingan secara berkala untuk memastikan bahwa petugas terus memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam pengisian ABK. Hal ini dapat dilakukan melalui sesi pelatihan tambahan, bimbingan individu, atau forum diskusi kelompok. Melakukan evaluasi terhadap proses pendampingan yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Perhatikan umpan balik dari petugas dan pihak terkait lainnya untuk memperbaiki pendekatan pendampingan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Republik. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik." *Bphn.Go.Id* 2003(1):3.
- Irmawati, Irmawati, Andy Arya Maulana Wijaya, and Muh. Askal Basir. 2022. "Transparansi Pelayanan Publik Dalam Administrasi Kependudukan Di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau." *Journal of Government Science Studies* 1(2):50–57. doi: 10.30598/jgssvol1issue2page50-57.
- Pemerintah Kota Surabaya. 2021. "Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya."
- Program, Mahasiswa, Studi Ilmu, Administrasi Negara, and Departemen Administrasi. 2018. "Kebijakan Dan Manajemen Publik Inovasi Produk E-Lampid Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Surabaya Antya Seruni Duhita." 6:1–11.
- Kun-Hsu Wu, (2010). Incorporating Workload and Performance Levels into Work Situation Analysis of Employees with Application to a Taiwanese Hotel Chain. *American Journal of Applied Sciences*, 7 (5) : 692-697.
- Mangkunegara. (2009). Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung : PT Refika Adi-tama.
- Mangkunegara, (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Remaja Rosda Karya Bandung.
- Murti, Silvi Rian (2013). Analisis Pengaruh Beban Kerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Guru SMP Negeri. Badan Penerbit Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta. Suwati,
- Yuli. (2013). Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Tunas Hijau Samarinda. *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1 (1) : 41-5